



IMPLIKASI POLITIK SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Debora Sanur L*)

Abstrak

KPU telah menetapkan Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan 53,15 persen suara mengalahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta yang memperoleh 46,85 persen suara. Namun demikian tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menggugat hasil KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendalilkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama Pilpres 2014. Sementara itu, berdasarkan pandangan pelaksana survei LSI dan SMRC bahwa masyarakat mengaku puas dengan Pemilu 2014. Masyarakat juga puas dengan penyelenggaraan pemilihan presiden oleh KPU yang dinilai bebas dan jujur.

Pendahuluan

Pada tanggal 22 Juli 2014 yang lalu KPU telah menyatakan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 bahwa dari 133.574.277 rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 atau 46,85 persen suara dan Jokowi-JK 70.997.883 atau 53,15 persen suara. Dengan hasil tersebut, KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Namun demikian, menurut tim pemenang Prabowo-Hatta hal tersebut tidaklah benar. Mereka mengklaim bahwa mereka telah dirugikan dari hasil rekapitulasi tersebut. Secara persentase kubu mereka yang seharusnya menang 50,25 persen dari Jokowi-JK 49,74 persen. Alasannya ada 55.485 TPS atau sekitar 24 juta suara yang bermasalah. Jumlah tersebut jauh di atas selisih kekalahan mereka dari Jokowi-JK sebesar 8,4 juta suara.

Berdasarkan hal tersebut Tim Pembela Merah Putih yang mewakili pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta menggugat hasil KPU tersebut ke MK. Mereka mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif selama Pilpres 2014. Mereka menolak hasil yang telah ditetapkan KPU, dan mempermasalahkan tentang perolehan angka yang dinilai tidak benar dan telah direayasa selama proses rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS ke PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU Pusat. Mereka juga mempermasalahkan terkait adanya jutaan pemilih siluman yang dimobilisasi dengan memanfaatkan ketentuan diperbolehkannya KTP/paspor/identitas lain untuk mencoblos. Dalam salah satu isi gugatannya, kubu Prabowo meminta MK untuk membatalkan penetapan Jokowi-Kalla sebagai pemenang namun menurut tuntutan mereka kecurangan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh KPU bukan tim Jokowi-JK.

*) Peneliti Muda Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.
E-mail: debora.sanur@dpr.go.id



Sengketa Pilpres

Secara umum, ada 4 pola dugaan kecurangan yang terjadi menurut tim Prabowo-Hatta. Yang pertama, kasus dugaan politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang kedua, adanya dugaan ketidaknetralan kepala daerah yang merugikan Prabowo-Hatta. Yang ketiga, perampasan dan perampokan formulir C1 milik pasangan Prabowo-Hatta, seperti terjadi di Bima dan Garut. Yang keempat, adanya indikasi mobilisasi pemilih siluman. Jumlah pemilih siluman ini diperkirakan mencapai lebih dari 227.000. jumlah tersebut sangat signifikan mempengaruhi hasil pemilihan secara nasional.

Namun demikian, menurut sejumlah pengamat klaim tersebut sulit dibuktikan. Menurut Direktur Eksekutif lembaga pemantau pemilu, Perludem, Titi Anggraini karena di tengah proses yang sangat terbuka, transparan, dan memberi akses kepada publik untuk ikut terlibat, memanipulasi 25 juta suara bukan hal yang mudah. Apalagi ketika hanya ada dua pasangan calon. Mereka harus dapat menjelaskan kecurangan yang membuat suara bisa begitu besar yang termanipulasi.

Ran Hirschl menyebutkan fenomena ini sebagai *judicialization of mega-politics* atau pengalihan peristiwa politik besar ke meja yudikatif. Dalam hal ini pengadilan yang menangani sengketa ini harus dilihat sejarah kelahirannya, komposisi hakim-hakimnya, serta posisi politiknya dalam kondisi terkini. Setiap tiga dari sembilan hakim yaitu Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Muhammad Alim dipilih oleh pemerintah, DPR dan MA oleh karena itu latar belakang mereka cukup beragam. Namun inisiatif publik yang luar biasa dalam mengawal pilpres kali ini juga telah membuat data, data perbandingan dan berbagai informasi tersedia, merupakan konteks politik yang penting yang harus diperhatikan oleh MK.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai bahwa menempuh gugatan ke MK merupakan jalur yang sudah ditentukan konstitusi. Hal ini bagus untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Rakyat bisa belajar berdemokrasi dari pertarungan Pilpres Prabowo dan Jokowi. Namun demikian, gugatan tersebut harus didasari dengan bukti-bukti kuat. Dugaan kecurangan tersebut jika dapat dibuktikan tentunya akan sangat mempengaruhi hasil Pilpres. MK pun bisa saja memutuskan untuk diadakan pemilu ulang. Sebaliknya, jika bukti, fakta kecurangan, dan data dugaan pelanggaran yang dibawa kubu Prabowo-Hatta tak dapat

dipertanggungjawabkan, gugatan tersebut hanya buang-buang waktu dan tidak berarti. Seperti kekuasaan menurut Weber bahwa kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan, tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Hal tersebut dapat membuat permohonannya di hadapan hukum menjadi lemah dan akan berimplikasi terhadap menurunnya pamor Prabowo-Hatta di mata masyarakat, terutama pemilihnya.

Sikap Prabowo yang dinilai tidak legowo dalam menerima ketetapan KPU telah membuat banyak pendukungnya menjadi kecewa. Berdasarkan hasil survei LSI, pendukung Prabowo mengkritik sikap Prabowo yang menarik diri di tengah proses rekapitulasi hasil resmi KPU. Demikian pula dengan penilaian Prabowo bahwa pilpres saat ini seperti di negara totalitarian, fasis atau komunis di mana kebebasan dan kejujuran politik tidak ada. Padahal bahkan, di Korea Utara tidak terjadi kemenangan 100 persen. Sementara disini ada tempat pemungutan suara yang tak memberikan satu suara pun kepada dia, meski dirinya didukung koalisi gemuk. Prabowo-Hatta didukung hingga tujuh parpol. Koalisi pendukungnya memperoleh hingga 62 persen suara saat pemilu legislatif April lalu. Hal tersebut dinilai oleh masyarakat awam sebagai bentuk tidak menghormati KPU, rakyat, konstitusi dan hasil pemilu itu sendiri. Terlebih karena sebelumnya Prabowo telah mengatakan bahwa ia siap terima apa pun yang diputuskan KPU.

Mengangkat isu kecurangan di tingkat akhir telah memunculkan tanda tanya karena hal ini merupakan upaya membangun opini bahwa kalah karena dicurangi. Terlebih dengan membawa KPU ke ranah hukum MK. Langkah ini dapat mendelegitimasi KPU dan implikasi politiknya cukup berat, yakni menolak hasil pilpres yang ditetapkan KPU. Padahal seyogyanya seorang pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap sah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya. Dalam hal pilpres legitimasi tersebut didapat dari KPU.

Menurut Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi, pernyataan Prabowo yang akan menghormati apapun keputusan rakyat hanya retorika politik untuk menarik simpati publik, namun faktanya justru berbanding terbalik. Masyarakat belajar dari perilaku tersebut. Hal ini tidak saja merugikan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra,

tetapi juga partai Koalisi Merah Putih. Ditambah dengan adanya tindakan kubu Prabowo yang merayakan kemenangan berdasarkan hasil *quick count* lembaga survei yang memenangkannya telah membuat para pendukung Prabowo-Hatta menjadi tidak simpatik.

Sesuai dengan hasil survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC), bahwa sikap Prabowo dan elit pendukung Koalisi Merah Putih yang menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilpres 2014 bukan cerminan pendukungnya. Penilaian tersebut justru bertentangan dengan masyarakat awam. Pemilih Prabowo dan pemilih Koalisi Merah Putih pada umumnya menilai pilpres berlangsung secara bebas dan jujur. Hasil survei SMRC menunjukkan 77,9 persen pemilih nasional menilai pilpres yang baru dilaksanakan berlangsung bebas dan jujur. Hanya 10,9 persen yang menilai bebas dan jujur tapi banyak masalah. Sedangkan yang sesuai dengan pendapat Prabowo bahwa pilpres tidak bebas dan tidak jujur sama sekali sebanyak 2,3 persen. Keadaan ini membuat Prabowo dan elit pendukungnya terasing dari masa pendukungnya.

Senada dengan survei SMRC, survei pasca-pilpres 2014 yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia juga memberi pandangan yang sama, dimana sebanyak 67,49 persen masyarakat mempercayai hasil resmi pilpres versi KPU bahwa Jokowi-JK adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara yang tidak percaya hanya 18,52 persen. Sikap tidak legowo menerima hasil pilpres ternyata menggerus simpati bagi Prabowo. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo-Hatta pasca-pilpres tinggal 34,75 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil rekap KPU (46,85 persen). Di sisi lain, suara bagi Jokowi-JK meningkat hingga mencapai 65,25 persen, melebihi hasil rekap KPU yang 53,15 persen. Artinya, jika pilpres diulang saat ini, pemenangnya tetap sama. Menurut survei tersebut sebesar 78,11 persen warga berharap semua pihak menerima dan menghormati keputusan MK. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan konflik pilpres yang seperti tak berkesudahan. Saat ini para elite politik sedang diuji tentang sikap terhadap demokrasi dan kontestasi politik. Oleh sebab itu jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa yang tidak siap dan tidak mau berdemokrasi ternyata adalah para elite politik. Menurut Kristiadi dari CSIS survei ini berguna menjaga kewarasan publik lantaran banyaknya politik verbal tanpa bukti yang gaduh akan propaganda. "Politik menjadi tak waras kalau pemilik modal mengkonstruksi realitas yang tak asli."

Implikasi Politik

Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Reformasi tahun 1998 adalah salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia, yang merupakan sebuah momentum yang di cita-citakan untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kehidupan yang demokratis dan bermartabat. Perlu disadari bahwa demokrasi adalah sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani. Demokrasi berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya. Dalam hal ini pemilu sebagai salah satu dasar bagi pembangunan sistem politik di negara demokrasi memiliki peran dan fungsi yang penting. Karena kualitas demokrasi salah satunya diukur dari kualitas pemilunya, kualitas pemilu akan menghasilkan kehidupan demokrasi negara yang berkualitas.

Pada dasarnya masalah pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu saja, tetapi juga hak politik warga negara. Pelanggaran seperti manipulasi suara pemilih secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti. Oleh sebab itu, perlu adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Partisipasi ini dapat meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya. Mengingat kondisi itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menemukan urgensinya. Dalam konteks pilpres 2014 hal tersebut telah dilakukan secara nyata oleh berbagai lapisan masyarakat, dengan turut serta mengawasi jalannya rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU.

Hal ini semakin ditegaskan oleh hasil survei Saiful Mujani *Research Consulting* (SMRC) dalam menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU yang menyatakan bahwa masyarakat mengaku puas dengan Pemilu 2014. Masyarakat puas dengan penyelenggaraan pemilihan presiden yang dinilai bebas dan jujur. Menurut lembaga ini, 48,2 persen pemilih menjawab pilpres sangat bebas dan jujur, 29,7 persen bebas dan jujur dengan sedikit masalah, 10,9 persen bebas dan jujur dengan banyak masalah, 2,3 persen menilai tidak bebas dan tidak jujur. Sisanya, 8,9 persen menjawab tidak tahu. Oleh sebab itu penolakan elite terhadap hasil KPU bukanlah pendapat

umum masyarakat awam.

Putusan MK nantinya pasti tidak dapat memuaskan semua pihak namun profesionalitas dan integritas MK serta masa depan demokrasi Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Menurut SMRC sebanyak 74,5 persen menginginkan adanya demokrasi, 5,8 persen diktator, dan 19,7 persen tidak mengerti. Data soal demokrasi itu jika dikelompokkan berdasarkan pemilih hasilnya konsisten. Pemilih Jokowi-JK 79 persen setuju demokrasi, 5 persen diktator dan 16 persen tidak mengerti. Pemilih Prabowo-Hatta 73 persen setuju demokrasi, 6 persen diktator dan 21 tidak mengerti. Sikap ini adalah indikasi bahwa demokrasi mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Oleh karenanya, dalam hal ini demokrasi tidak bisa shanya diartikan jika membawa kemenangan bagi diri, bila tidak menang dinilai tidak demokrasi.

Penutup

Persoalan di akhir rangkaian proses Pilpres justru berada pada peserta Pemilu yang menolak hasil penetapan KPU. Meski UU memberi ruang peserta Pilpres mengajukan sengketa hasil Pilpres, namun ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pilpres 2014 telah menjadi ujian bagi elite partai terhadap pembelajaran demokrasi. Pilpres 2014 akhirnya dinilai hanya sebagai pertarungan elite kekuasaan melawan kekuatan rakyat. Pertarungan antara yang besar melawan yang kecil. Membawa kepada pemikiran dimana koalisi rakyat dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sementara koalisi elite dari elite dan untuk kepentingan elite. Kenyataan seperti itu bisa memicu keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat sebenarnya sebagian besar warga telah mampu menjalankan satu langkah besar berdemokrasi dengan cara yang benar dengan memilih dalam pilpres. Warga biasa telah tulus menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan capres-cawapres demi mendapatkan pemimpin yang baik bagi bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan, tetapi mereka justru dicerai harapannya oleh sekelompok elite yang mengedepankan kepentingan golongannya sendiri. Padahal tujuan utama dari pesta demokrasi ini adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan demi kepemimpinan yang amanah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya semua pihak menerima dengan besar hati apapun hasilnya keputusan MK nantinya. Karena di depan masih banyak masalah besar bangsa yang butuh perhatian bersama.

Referensi

- Stefanus Osa Triyatna, ed., *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan The Asia Foundation (TAF), Jakarta. 2013
- Bivitri Susanti, Panggung Politik MK, *Kompas* 6 Agustus 2014, hal 7.
- Sengketa Pemilihan Gugatan Prabowo lemah, *Koran Tempo* 5 Agustus 2014, hal 1.
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140808_mahkamah_konstitusi.shtml, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/10/078598548/Pasca-Pilpres-Masyarakat-Lebih-Optimis>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://pemilu.okezone.com/read/2014/08/07/568/1021056/gugatan-prabowo-ke-mk-bukti-kemajuan-demokrasi>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://www.jpnn.com/read/2014/08/06/250099/Ketua-MK:-Gugatan-Prabowo-Hatta-Banyak-yang-Tak-Sinkron->, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/07/078597988/Merasa-Kecewa-Pendukung-Prabowo-Pindah-Dukungan>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/08/05/n9tdra-jokowijk-siap-dukung-kpu-hadapi-prabowohatta>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <https://id.berita.yahoo.com/akademisi-sikap-prabowo-rugikan-koalisi-merah-putih-043708544.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/06/12/harapan-masalah-dan-ancaman-jelang-pilpres-2014>, diakses tanggal 6 Agustus 2014.
- <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/10/16155421/survei.smrc.prabowo.sebut.totaliter.majoritas.masyarakat.anggap.pilpres.jujur.>, diakses tanggal 5 Agustus 2014.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/06/1111086/Prabowo.Anggap.Pilpres.di.Indonesia.seperti.di.Negara.Totaliter.Fasis.Komunis>, diakses tanggal 6 Agustus 2014.
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/10/078598538/Mayoritas-Masyarakat-Puas-Pilpres-2014>
- <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/10/173455/2658044/1562/survei-smrc-masyarakat-puas-dengan-hasil-pilpres-2014>
- <http://www.kabar24.com/perspektif/read/20140811/18/226238/sengketa-pilpres-masyarakat-sudah-jenuh>, diakses tanggal 7 Agustus 2014.
- <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/10/151524/2657999/1562/survei-smrc-745-warga-indonesia-setuju-demokrasi-58-ingin-diktator>, diakses tanggal 6 Agustus 2014.